

## INTISARI

Penerapan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meratakan pembangunan di seluruh Indonesia, terutama pembangunan di daerah pedesaan dan daerah tertinggal. Penerapan ADD ini tergolong dalam kebijakan yang baru diterapkan, yaitu dimulai pada tahun 2015 dan terus berjalan sampai saat ini. Pada Praktiknya, pemerintah terus menaikkan anggaran dengan cukup signifikan untuk ADD setiap tahunnya dengan tujuan mempercepat pembangunan di berbagai daerah. Namun di sisi lain, penerapan dana desa ini juga menimbulkan beberapa dilema seperti adanya kasus korupsi atau manipulasi oleh kepala desa, minimnya kemampuan SDM desa dalam mengelola dana yang besar, kurangnya transparansi dalam pengelolaan, penyerapan dana yang kurang maksimal, dan lain sebagainya yang menunjukkan rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Objek dari penelitian ini adalah Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, yang merupakan desa dengan wilayah terluas dan anggaran APBDes tertinggi di kecamatan Kretek. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada perangkat desa yang bersangkutan dan perwakilan dari masyarakat desa itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Parangtritis sudah baik, baik dari segi keuangan maupun kinerja dan dapat dijadikan contoh untuk desa lainnya. Namun, masih terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan lagi oleh desa untuk lebih menyempurnakan pengelolaannya di masa yang akan datang.

## ABSTRACT

The implementation of village fund policy is intended to even up the development and growth throughout the country, especially development in the countryside and underdeveloped regions. The implementation of village fund policy is relatively new, which is started in 2015 and has been continued up until now. In practice, the government keep increasing the budget of village fund significantly from one year to the next, with the intention to accelerate the development and growth in various regions. But on the other hand, the implementation of village fund policy give rise to several problem such as corruption or manipulation by village head, the lack of human resources to manage great amount of money, the lack of transparency in management of the fund, incapability to utilize the fund optimally, and etc which shows the lack of accountability in managing the village funds.

The object of this research is the village of Parangtritis, Kretek district, Bantul regency, which is the the village that have the widest territory among other villages and have the most highest budget in Kretek district. This research was done using the interview method with the subject of village apparatus involved in managing the village funds and representative from the village community itself.

The result of the research shows that the accountability in village funds management is quiet favorable, in both financial and performance accountability. However, there is still room for improvement to perfecting the village capability to manage the village funds in the future.